**ABSTRAK**

Penelitian yang berjudul **Implementasi *Good Governance* dalam Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Medan Marelan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara,** yang menerapkan sistem Otonomi Daerah dalam menjalankan bagiannya yang telah mendorong aparatur negara yang dituntut untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung keterpaduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan dengan mempraktekkan *good governance.*

Perizinan pembangunan sangat berkaitan dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang menjadi suatu sorotan beberapa pihak mengenai kemudahan mendirikan bangunan ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan kewenangan Kecamatan Medan Marelan yang diberikan dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan dan langkah apa yang dilakukan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

 Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh kesimpulan bahwa dalam hal penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat dalam Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Medan Marelan Masih adanya kekurangan dalam proses pengurusan IMB, dikarenakan belum adanya pelimpahan kewenangan kepada Kecamatan dalam pengurusan IMB, sehingga Kecamatan Medan Marelan hanya mengeluarkan surat rekomendasi tentang status tanah yang akan dibuat Surat Izin Mendirikan Bangunan.

 Pelaksanaan pelayanan belum berjalan dengan optimal, dikarenakan beberapa hal, yaitu jumlah SDM pegawai yang masih belum memadai, sarana dan prasarana, minimnya pengetahuan masayarakat dan kurangnya sosialisasi. Disarankan harus adanya penambahan SDM pegawai di Kecamatan Medan Marelan dengan pembagian rata pegawai di Kecamatan yang jauh dari pusat kota,meningkatkan fasilitas pelayanan serta mensosialisasikan IMB kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan maupun media massa.

**ABSTRACT**

The research entitled Implementation of Good Governance in Building Permit Services in Medan Marelan Sub-Province, Medan City, North Sumatera Province, implementing the Regional Autonomy System in carrying out its part that has encouraged the state apparatus required to realize the state administration capable of supporting the integration of the implementation of the main tasks and functions in the implementation of state governance and development by practicing good governance.

Development permit is closely related to Building Permit (IMB) which became a spotlight of some parties regarding the ease of building this aims to know about how the implementation of the authority of the District of Marelan granted in the management of Building Permits and what steps are done in providing excellent service to the community .

Based on the result of the research, it can be concluded that in the case of the provision of services to the community in Building Permit in the Sub-District of Medan Marelan Still there is a shortage in the process of IMB management, due to the lack of delegation of authority to the Kecamatan in the management of IMB, so that the District of Medan Marelan only issued a letter of recommendation on the status land that will be created Building Permit.

Implementation of services has not run optimally, due to several things, namely the number of human resources that are still insufficient employees, facilities and infrastructure, lack of community knowledge and lack of socialization. It is suggested that the addition of human resources of employees in the sub-district of Medan Marelan with the average distribution of employees in the sub-district far from the city center, improve the service facilities and socialize the IMB to the community in the form of counseling and mass media.